

TAJUK RENCANA

Siaga Darurat Bencana

DATANGNYA bencana tidak pernah bisa diduga. Bisa sewaktu-waktu terjadi kapan saja dan di mana saja. Kejadianya begitu tiba-tiba. Lihat saja gempa di Ciganjur dan gempa-gempa lain sebelumnya. Hanya saja untuk bencana hidrometeorologi, sering muncul tanda-tanda sebelumnya, misalnya hujan deras dengan intensitas tinggi. Juga bencana terkait gunung berapi yang ditandai naiknya aktivitas vulkanik, meski belum tentu terjadi bencana.

Karena itu, sudah semestinya kalau kita semua senantiasa siaga menghadapi bencana. Baik kita semua sebagai warga masyarakat maupun segenap aparat pemerintah, khususnya yang terkait. Upaya ini sudah dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY yang merekomendasikan penetapan status Siaga Darurat Bencana kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, terkait dampak cuaca ekstrem di DIY. Hal ini ditempuh menyikapi kondisi cuaca belakangan ini

“Kami sudah mengirim surat kepada Pak Gubernur berupa telaah dan juga mohon arahan untuk menetapkan status Siaga Darurat. Untuk mengantisipasi terjadinya bencana termasuk bencana hidrometeorologi, kami minta masyarakat dan stakeholders terkait tetap dan selalu meningkatkan kewaspadaan,” kata Kepala Pelaksana BPBD DIY Biwara Yuswantana, (KR, Kamis 30/11).

Status siaga darurat adalah salah satu istilah yang berkaitan dengan komando penanganan bencana alam. Siaga darurat hanya bisa diumumkan oleh pihak yang berwenang. Dalam Peraturan Kepala Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dijelaskan, status siaga darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peringatan ancaman. Hal itu berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.

Dalam UU Nomor 24 tahun 2007 disebutkan, status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk

jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. Pada tingkatan nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat provinsi oleh gubernur, dan tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota.

Biwara menjelaskan, penetapan status Siaga Darurat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal. Salah satunya hasil telaah dan kajian Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terkait potensi cuaca ekstrem di DIY. Selain itu, beberapa kabupaten di DIY juga telah menetapkan status Siaga Darurat terlebih dahulu. Dengan adanya status Siaga Darurat, koordinasi dan penanganan seandainya terjadi bencana alam diharapkan bisa lebih optimal. Dengan status Siaga Darurat, Pemda DIY dapat melakukan respons cepat menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT). Dengan status Siaga Darurat diharapkan juga dapat meningkatkan kesiapsiagaan.

Meski begitu, pasti kita tidak menginginkan terjadinya bencana. Untuk itu memang mesti dibarengi dengan berbagai upaya, baik secara lahir maupun batin, misalnya mewaspadaai kawasan yang berpotensi longsor, atau dengan berdoa saat hujan deras semoga air yang turun menjadi berkah, bukan musibah. Selain itu, juga melakukan berbagai antisipasi lain yang memungkinkan untuk dilakukan, misalnya tidak membuang sampah sembarangan, khususnya di saluran air, ataupun menggunduli hutan. Sedang dalam agama Islam, dengan bersedekah bisa sebagai *wasilah* atau sarana menolak balak atau bencana.

Karena itu kita cukup mengapresiasi kesadaran masyarakat untuk bersedekah yang semakin meningkat. Contohnya saja di kebanyakan masjid setiap Jumat ada sedekah. Sejumlah dermawan juga membuka warung Jumat berkah. Bila terjadi suatu bencana, masyarakat juga begitu ringan untuk memberikan bantuan dalam bentuk apapun, misalnya saat bencana tanah longsor di Semin Gunungkidul beberapa waktu lalu, atau bantuan untuk korban gempa Cianjur yang sampai saat ini masih terus kita galang. Semoga berbagai upaya tersebut bisa menjauhkan kita dari segala bencana. □**d**

Tanggung Jawab Desa Melindungi Pekerja Miskin

DESA menjadi fokus perhatian pembangunan Indonesia. Dengan 74.961 desa dan 42,1% penduduknya tinggal di pedesaan memang harus fokus pada kesejahteraan warga desa. Mata pencaharian masyarakat desa bergantung dengan alam, sehingga digolongkan sebagai pekerja rentan. Seperti nelayan, keselamatannya tergantung dengan kondisi alam. Demikian juga petani.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), konsep pekerja miskin diperoleh dengan mengombinasikan antara status kemiskinan dan status pekerjaan, seberapa besar mereka walaupun bekerja tetapi hidup dalam kemiskinan. Negara harus hadir dalam konteks memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek). Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang lahir dari amanah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 upaya perlindungan Jamsostek diwujudkan.

Gagasan

Belakangan ada gagasan satu desa 100 pekerja miskin terlindungi yang dijalankan di Kalimantan Barat. Sebuah inisiatif yang mengajak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memberikan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) plus beasiswa. Juga dimungkinkan program Jaminan Hari Tua (JHT), untuk perlindungan hari tua dengan menabung di JHT.

Jamsostek diberikan langsung dengan skema bantuan iuran. Saat ini terdapat 30.200.000 pekerja rentan dan miskin yang menjadi sasaran akuisisi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Dari target tersebut baru 53,33%, yaitu 1,219,409 juta pekerja pekerja rentan terakuisisi.

Pada dasarnya jaminan sosial merupakan hak seluruh pekerja dan keluarga tanpa terkecuali. Pekerja rentan khususnya di pedesaan memiliki risiko sosial yang tinggi dan akses literasi keuangan dan jaminan sosial yang minim, sehingga sangat dekat dengan garis kemiskinan. Sesuai dengan tipologi Sustainable Development Goals (SDGS) Desa. Perlu sinergi lima

Muhammad Zuhri Bahri

komponen pentahelix : pemerintah daerah, pengusaha, masyarakat, akademi, dan media. Jelas, agar gerakan perlindungan satu desa 100 pekerja rentan tepat sasaran.

Sebagai ilustrasi, JKK dan JKM seorang pekerja membayar Rp 16.800/orang/bulan. 100 pekerja rentan maka Rp 16.800 x 12



KR-JOKO SANTOSO

bulan atau Rp 20.160.000. Pemda dapat membuat regulasi yang menganjurkan desa menggunakan dana alokasi daerah (ADD). Skema ini sebagai stimulan atau pancingan yang mengajarkan pekerja rentan mandiri dan selanjutnya dapat membayar sendiri iurannya. Posisinya akan digantikan oleh pekerja rentan lainnya yang membutuhkan (*revolving*).

Prediksi Resesi

Selain itu, dimungkinkan dana *corporate social responsibility* (CSR) turut diarahkan. CSR merupakan pertanggungjawaban suatu perusahaan kepada semua pihak dengan melaksanakan program yang bermanfaat. Apalagi ada prediksi resesi pada tahun-tahun mendatang, perlu dipikirkan sumber alternatif pembiayaan seperti CSR dan mendorong orang yang berkemampuan ekonomi lebih berpartisipasi-

Sudahkah Perpustakaan Ramah Disabilitas?

Triningsih & NP Premierita H

melihat.

Pemanfaatan fasilitas publik mendukung penyandang disabilitas dalam mengembangkan diri salah satunya melalui pemanfaatan perpustakaan. Undang-undang tentang perpustakaan No 43 Tahun 2007 pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan. Secara tersirat dalam undang-undang tersebut jelas bahwa penyelenggaraan perpustakaan itu dilakukan dengan keadilan tanpa terkecuali termasuk mereka yang mengunjungi perpustakaan dengan berkebutuhan khusus (disabilitas).

Pentingnya memahami kebutuhan seluruh pemustaka (pengguna perpustakaan) menjadi salah satu tugas penting dalam penyelenggaraan perpustakaan. Ada empat hal yang perlu diperhatikan untuk membuat desain perpustakaan yang ramah disabilitas, yaitu arsitektur bangunan, layanan dan aktivitas perpustakaan, koleksi perpustakaan, dan pelatihan. Keempat hal tersebut diharapkan dapat mengakomodir semua populasi khususnya bagi pengunjung yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas (Cruz, 2018).

Tiga Kategori

IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), menyebutkan bahwa aksesibilitas gedung perpustakaan terdiri dari tiga kategori, yaitu standar akses fisik, format media dan layanan, dan komunikasi bagi orang-orang disabilitas. Sedangkan standar akses fisik menurut

IFLA Checklist (2005:4) terdiri dari tiga bagian : Area luar, yang terdiri dari : area parkir, ramp atau jalur sirkulasi yang memiliki kemiringan tertentu sebagai pengganti tangga, telepon. Area dalam perpustakaan yang terdiri dari area masuk, ramp, tangga atau lift dan akses fisik layanan & ruang yang terdiri dari ruangan, toilet, meja sirkulasi, meja referensi, area anak-anak, gedung.

Esok, 3 Desember adalah Hari Disabilitas Internasional. Marilah kita memberikan dukungan dan perhatian dalam pemenuhan hak dan kewajiban penyandang disabilitas disetiap aspek kehidupan mulai dari politik, sosial, ekonomi & budaya, termasuk didalamnya yaitu perpustakaan. Agar mereka tumbuh dan hidup menjadi sosok yang berguna serta inspiratif dalam kehidupan ini. □**d**

*) **Triningsih**, Pustakawan Muda UIN

Raden Mas Said††Surakarta)

*) **NP Premierita H**, Alumni Minat

Studi Manajemen Informasi dan

Perpustakaan Fakultas Sekolah

Pascasarjana UGM Yogyakarta)

Pojok KR

Gempa Cianjur, ratusan keluarga berisiko stunting.

-- Ayo kita uluran bantuan untuk menanganinya!

Alokasi Danais Naik Rp 100 miliar.

-- Mari kita manfaatkan secara tepat.

‘Smart Farm’ UNY, pelopor pertanian nasional.

-- Perlu diterapkan di daerah-daerah lain.

Berabe

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) Penasihat: Drs HM Idham Samawi. Komisaris Utama: Prof Dr Inajati Adrisijanti. Direktur Utama: M Wirmon Samawi SE MIB.

Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. Direktur Keuangan: Imam Satriadi SH. Direktur Umum: Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSC. Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Drs H Octo Lampito MPd. Wakil Pemimpin Redaksi: Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. Redaktur Pelaksana: Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. Manajer Produksi Redaksi: Ngabdul Wakid. Redaktur: Dra Hj Padmi Sustiwi, Dra Prabdandari, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afriati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. Fotografer: Efty Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. Grafis : Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. Sekretaris Redaksi: Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. Kepala TU Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklikanryk23@yahoo.com, iklikanryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris). Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm . Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggung-jawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. Alamat e-mail: naskahkr@gmail.com. Radio : KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd, Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP